

**ANALISIS KONTEN DAN KOMPARATIF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT &
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT BERDASARKAN
PEDOMAN UMUM GCG DAN STANDAR GRI G4
(Studi kasus pada Laporan Tahunan dan *Sustainability Report*
Indo Tambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam tahun 2013)**

Oleh:

Gloria Patricia Rantetoding

Dosen Pembimbing:

Prof. Eko Ganis Sukoharsono,SE.,M.Com.,PhD.

Universitas Brawijaya

Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya, Jl. MT Haryono 165, Malang

Email: grantmita@gmail.com

ABSTRACT

This research is conducted to provide information about the implementation of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility applied in each of report based on GCG Regulation (KNKG 2006) and GRI G4. This research is a qualitative research with case study approach on content of annual report and sustainability report from both of mining corporations, Indo Tambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam year 2013. The results of this research shows that both of corporations has implemented good enough Good Corporate Governance even it can't be seen directly to the company. For Corporate Social Responsibility, it well said based on report that both corporations completed 50% of all performance indicator in GRI G4. Corporations still have to make it more complete to achieve all of the performance indicator in the next report. And also their Good Corporate Governance towards a better future company.

Keywords : *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, mining, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.*

1. Pengantar

Perkembangan yang sangat pesat pada arus informasi saat ini menyebabkan banyak perusahaan berlomba lomba untuk meningkatkan reputasi perusahaan. terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang, *stakeholder* atau pemangku kepentingan tidak semata-mata melihat dari kinerja keuangan perusahaan saja, melainkan apa yang bisa perusahaan berikan bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada.

Isu lingkungan kian menjadi erat kaitannya dengan perusahaan. Perusahaan mempunyai pengaruh penting dalam roda perekonomian. Perusahaan terus berkembang menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan hadir untuk menyerap tenaga kerja yang kemudian dapat mengambil peran dalam kesejahteraan manusia.

Sungguh ironis karena dibalik hal-hal tersebut perusahaan turut menyumbang perusakan ekosistem lingkungan.

Perusakan ekosistem lingkungan sering terjadi selama proses produksi dan pasca proses produksi diantaranya pencemaran udara, air dan tanah. Perusakan lingkungan ini disebabkan semata-mata karena perusahaan yang selalu berorientasi pada keuntungan. Paham kapitalis yang banyak dianut perusahaan seringkali mengabaikan keseimbangan kehidupan yang terjadi di sekeliling perusahaan.

Pada dasarnya, penerapan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bagian dari komponen *Good Corporate Governance (GCG)*. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, disebut bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Prinsip-prinsip GCG berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, terdiri dari : (1) Prinsip Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; (2) Prinsip Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (3) Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (4) Prinsip Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan di kelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (5) Prinsip Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak dapat terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance*. Kedua hal inilah yang menarik minat penulis untuk menganalisa sejauh mana perusahaan pertambangan di Indonesia menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan sejauh mana pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan GRI G4 dengan judul “Analisis Konten *Good Corporate Governance Report & Corporate Social Responsibility Report* berdasarkan Pedoman Umum GCG dan Standar GRI G4 (Studi kasus pada Laporan Tahunan dan *Sustainability Report* Indo Tambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam tahun 2013)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan GCG perusahaan berdasarkan Pedoman Umum Kebijakan *Governance* (KNKG 2006) dan bagaimana penerapan CSR yang dilakukan perusahaan berdasarkan standar GRI G4.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Corporate governance refers to the structures and processes for the direction and control of companies. Corporate governance concerns the relationships among the management, Board of Directors, controlling shareholders, minority shareholders and other stakeholders. Good corporate governance contributes to sustainable economic development by enhancing the performance of companies and increasing their access to outside capital.”

Dengan kata lain, definisi tersebut memberi arti pentingnya kerja sama yang baik antara manajemen, dewan komisaris, direksi, pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan baik itu sistem manajemen, kumpulan aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang memiliki hubungan baik antara pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta sebuah akuntabilitas publik.

2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Di dalam penerapan *Good Corporate Governance* terdapat beberapa prinsip-prinsip berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara lain (a) Transparansi; (b) Akuntabilitas; (c) Pertanggungjawaban; (d) Kemandirian; dan (e) Kewajaran.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Sedangkan akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Kejelasan fungsi dalam organisasi berguna untuk kesinambungan sebuah organisasi. Maka dari itu, akuntabilitas perusahaan dilihat dari penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

KNKG menjelaskan bahwa pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Sedangkan independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dapat ditunjukkan dari tidak adanya dominasi oleh pihak manapun. Tidak adanya dominasi dari pihak manapun ini bisa berjalan salah satunya dengan cara melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab di dalamnya.

Terakhir, kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya baik itu antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya mengutamakan pemegang saham, kewajaran dalam hal ini juga berlaku dalam hal penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.3 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Akuntansi sosial dan lingkungan (yang kita ketahui juga sebagai akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, *corporate social reporting*, *corporate social responsibility reporting*, *non-financial reporting*, atau *sustainability accounting*) adalah proses pengkomunikasian efek sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi kepada beberapa kelompok tertentu dalam suatu lingkungan (Gray, 1994).

Zarkasyi (2007: 10) mendefinisikan akuntansi sosial dan lingkungan adalah suatu usaha untuk mengganti kerugian dengan pertimbangan bahwa organisasi mempengaruhi, melalui tindakannya, pada lingkungan eksternal (baik secara positif dan negatif) dan karenanya harus memperhitungkan efek-efek sebagai bagian dari keseluruhan akuntansi sebagai tindakannya.

Dari kedua definisi diatas, dapat dilihat bahwa salah satu aspek dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah komitmen. Komitmen perusahaan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan tidak hanya dari segi keuangan perusahaan saja melainkan membangun kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda (Suwardjono, 2005). Security Exchange Committee (SEC) menuntut lebih banyak pengungkapan karena pelaporan keuangan mempunyai aspek sosial dan publik. Oleh karena itu, pengungkapan dituntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan kuantitatif, baik yang mandatory maupun voluntary disclosure (Chrismawati, 2007)

2.5 *Global Reporting Initiative (GRI) G4*

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah menunjukkan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). G4, generasi keempat Pedoman Pelaporan CSR ini diluncurkan pada bulan Mei 2013. Tujuan sederhana dari G4 adalah untuk membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna – dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantap dan terarah menjadi praktek standar. G4 memusatkan pelaporan pada konsep materialitas. Ini artinya mendorong organisasi pelapor untuk hanya memberikan informasi tentang hal-hal yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan organisasi untuk keberlanjutan dan mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Standar GRI G4 (2013), terdapat dua jenis pengungkapan, yakni Pengungkapan Standar Umum dan Pengungkapan Standar Khusus. Pengungkapan standar umum menetapkan konteks keseluruhan untuk laporan, memberikan gambaran tentang organisasi dan proses pelaporannya. Pengungkapan ini berlaku untuk semua organisasi terlepas dari penilaian materialitas. Sedangkan pengungkapan standar khusus dibagi menjadi dua bagian yakni DMA dan Indikator. DMA atau Pengungkapan Pendekatan Manajemen mengarah pada aspek yang ingin dikelola oleh perusahaan. Setidaknya ada 3 aspek didalamnya yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Dari tiga hal tersebut dijelaskan mengapa aspek tersebut material, bagaimana dampaknya dikelola dan bagaimana pengelolaan aspek ini dievaluasi. Sedangkan Indikator sebisa mungkin memberikan informasi tentang dampak yang dihasilkan oleh ketiga aspek baik ekonomi, lingkungan atau sosial.

Selain pengungkapan standar umum dan standar khusus, terdapat pula pelaporan tentang isu-isu sektor spesifik. Adanya pelaporan spesifik dikarenakan tidak semua perusahaan atau organisasi bergerak pada bidang yang sama dan untuk hal-hal

tertentu perusahaan dengan sektor tertentu wajib mencantumkan salah satu indikator spesifik di dalam laporan keberlanjutan.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menitikberatkan pada telaah informasi dalam literatur teori yang berhubungan dengan tema besar penelitian. Selain itu, dilakukan pula telaah dokumen (laporan tahunan dan *sustainability report*) secara menyeluruh mengenai pengungkapan aktivitas CSR. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan praktik tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada 2 perusahaan pertambangan di Indonesia untuk laporan tahunan dan *sustainability report* periode 2013. Penelitian ini membandingkan pelaksanaan GCG dan CSR kedua perusahaan tersebut dengan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 yang kemudian diubah menjadi PER-01/MBU/2011 dan disempurnakan lewat PER-09/MBU/2012, serta GRI *Standard* 4. Dua perusahaan yang tercantum didalamnya antara lain :

- a. Indo Tambangraya Megah Tbk.
- b. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

Pada dasarnya, perusahaan pertambangan ini dipilih karena tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan cenderung lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya, seperti perbankan, manufaktur dan lain-lain. Perusahaan pertambangan yang dipilih adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan tata kelola perusahaan. Selain itu, perusahaan pertambangan yang mempublikasikan *sustainability report* secara terpisah dari laporan tahunannya dan menggunakan G4 sebagai standar pelaporan seluruh tanggung jawab sosial perusahaan.

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan yaitu laporan tahunan dan *sustainability report*. Tahun pengungkapan laporan yang diambil adalah tahun 2013 mengingat masih banyaknya laporan tahunan 2014 yang belum selesai diaudit ataupun belum dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang dilakukan dengan mengumpulkan segala dokumen baik dari BEI maupun internet yang mempunyai relevansi terhadap kebutuhan penelitian yang nantinya akan dilakukan.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis* dengan dibantu model analisis Miles and Huberman. *Content analysis* merupakan metode penelitian yang menggunakan seperangkatn prosedur untuk membuat pendugaan (*inference*) atas suatu teks. Tujuan *content analysis* adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis (Indriantoro dan Supomo, 2002; 159). Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005:91-99) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Data Reduction

Dalam penelitian ini, penulis membuat tabel kelengkapan data yang berisi tentang ada atau tidaknya komponen indikator baik itu Indikator *Good Corporate Governace* atau Indikator *Corporate Social Responsibility*. Indikator GCG berdasar pada Pedoman KNKG 2006, sedangkan indikator CSR berdasar pada GRI4. Ada atau tidaknya komponen indikator tersebut dilihat dari Laporan Tahunan dan juga Indeks GRI yang terdapat dalam *Sustainability Report* perusahaan.

2. Data display

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 analisis terhadap isi laporan historis baik yang dalam bentuk laporan tahunan maupun *sustainability report* yang dikeluarkan perusahaan. Proses analisis dilakukan dengan mencari aspek-aspek yang terdapat dalam tabel kerja apakah dilaporkan atau tidak dalam laporan tahunan dan *sustainability report*. Setelah itu, penulis mengisi tabel kerja berdasarkan hasil analisis yang akan dibahas dalam pembahasan dan membuat ringkasan atas hasil yang didapatkan dari tabel kerja.

3. *Conclusion drawing* atau *verification*. Data ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis subjektif penulis ketika menganalisa dan membandingkan pengungkapan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan tahunan dan *sustainability report* masing-masing perusahaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Profil Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)

Indo Tambangraya Megah berdiri pada tahun 1987 sebagai Perseroan Terbatas, kemudian pada tahun 2007 diakuisisi oleh Grup Banpu Thailand dan selanjutnya pada bulan Desember 2007 menjadi perusahaan terbuka. Banpu melalui PT Centralink Wisesa International memiliki 77,60% saham, PT Sigma Buana Cemerlang 2,40% dan selebihnya merupakan saham masyarakat. Lokasi Kalimantan Timur berpusat di Jakarta dan memiliki wilayah operasional di masing-masing anak perusahaan berada yakni Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

4.2 Profil Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA)

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (*open pit mining*) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya di tahun 1923, dimulai metode penambangan bawah tanah (*underground mining*) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia

kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Pada tanggal 1 Maret 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), yang selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan "PTBA".

Wilayah Operasional Tambang Batubara Bukit Asam terdapat di Sumatera Selatan, Riau dan juga anak perusahaan yang terdapat di Samarinda.

4.3 Penerapan GCG ITM

Transparansi

Indo Tambangraya Megah Tbk mempublikasikan seluruh laporannya baik itu laporan tahunan, laporan keuangan dan *sustainability report* dalam website perusahaan <http://www.itmg.co.id/id> atau melalui website Bursa Efek Indonesia. Sebagai bentuk partisipasi langsung dalam hal transparansi, ITM membuat sebuah fasilitas yang dinamakan *Transparency Centre*.

Akuntabilitas

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kedudukan tertinggi sebagai forum bertemunya pihak internal perusahaan dengan pemegang saham perusahaan. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya membahas struktur dewan komisaris maupun dewan direksi, pembahasan kebijakan perusahaan, masalah yang terjadi dalam perusahaan, pengumuman tentang pembagian dividen, kinerja perusahaan dan sebagainya. Di bawah Rapat Umum Pemegang Saham terdapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai organ perusahaan. Masa jabatan dewan komisaris dan Dewan Direksi ITM adalah 3 tahun. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi saran kepada Direksi dalam hal pengelolaan dan strategi perusahaan dalam menerapkan GCG. Tentu saja pengelolaan secara langsung bukan menjadi tugas dari Dewan Komisaris melainkan Dewan Direksi.

Responsibilitas

Salah satu tanggung jawab perusahaan berhubungan dengan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan. Sistem pengendalian internal ITM menjadi salah satu tanggung jawab utama dari Audit Internal yang bertanggung jawab pada Dewan Direksi. Audit internal inilah yang menelaah dan mengevaluasi apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan sistem pengendalian internalnya. Selain tanggung jawab perusahaan akan sistem pengendalian internal, berdasarkan Pedoman Umum Kebijakan Governance tahun 2006, tanggung jawab perusahaan erat kaitannya pada kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Independensi

Dalam struktur tata kelola perusahaan, independensi ditunjukkan melalui larangan Dewan Komisaris untuk turut berpartisipasi dalam mengambil keputusan operasional. Terdapat pula persyaratan Komisaris Independen yang mengharuskan untuk tidak terafiliasi dalam cara apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris atau Direksi baik secara horizontal maupun vertikal dan sebagainya.

Kewajaran

Sepanjang tahun 2013, ITM melakukan rekrutmen 126 orang dari 5 universitas negeri terkemuka. Beberapa karyawan yang direkrut sebelumnya adalah penerima beasiswa hasil kegiatan CSR dari ITM. Proporsi SDM yang berasal dari dalam negeri sebesar 3042 orang lebih besar dari 102 orang yang berasal dari luar negeri.

Sepanjang tahun 2013, ITM telah melaksanakan berbagai cara untuk mengembangkan kualitas SDM-nya, antara lain dengan seminar, lokakarya, pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan instruktif.

4.4 Penerapan GCG PTBA

Transparansi

Dalam hal keterbukaan atau transparansi, seperti dikemukakan kutipan di atas, Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan kelancaran hubungan antar organ Perseroan, hubungan antara perseroan dengan pemangku kepentingan serta dipenuinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan dalam perusahaan PTBA adalah sebagai *liason officer*, *compliance officer*, serta *investors officer*. Segala bentuk laporan baik itu laporan yang sifatnya tahunan maupun setiap rekap publikasi baik publikasi pers, penataan administrasi dan penataan dokumen telah dilakukan oleh PTBA. Hal ini menjamin keterbukaan dokumen yang memang boleh diketahui oleh publik.

Akuntabilitas

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan perseoran, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain. Fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite diantaranya Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM.

Responsibilitas

Salah satu tanggung jawab perusahaan berhubungan dengan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan. Sistem pengendalian internal PTBA menjadi salah satu tanggung jawab utama dari Sistem Manajemen. Sistem manajemen perusahaan sendiri terdiri dari Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen K3. Ruang lingkup pengendalian internal, termasuk di dalamnya tata kelola perusahaan menjadi bagian dari tanggung jawab Satuan Pengawas Intern (SPI).

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan akan lingkungan eksternal perusahaan, maka PTBA mencanangkan 5 Sinergi Program dengan berbagai kegiatan yang termasuk di dalamnya, antara lain :

- Peduli Ummat
- Cinta Sekolah
- Peduli Masyarakat
- Teranglah Desaku
- PTBA Green & Clean

Independensi

Dalam struktur tata kelola perusahaan, independensi ditunjukkan melalui larangan Dewan Komisaris untuk turut berpartisipasi dalam mengambil keputusan operasional. Terdapat pula persyaratan Komisaris Independen yang mengharuskan untuk tidak terafiliasi dalam cara apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris atau Direksi baik secara horizontal maupun vertikal dan sebagainya. Bukti adanya hubungan afiliasi atau tidak dilihat dalam profil dewan direksi maupun dewan komisaris. Dan dari keseluruhan pimpinan dan anggota dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi PTBA, tidak ada satupun yang memiliki hubungan afiliasi dengan pihak manapun.

Kewajaran

Prinsip kewajaran atau *fairness* diterapkan PTBA pada saat RUPS berlangsung. Setiap keputusan penting di dalam RUPS diambil melalui voting yang dapat diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan. Bagi pemegang saham minoritas tetap diperhatikan kepentingannya dalam pengambilan keputusan atau penyampaian gagasan dengan mekanisme tertentu.

Sepanjang tahun 2013, jumlah karyawan yang diterima sesuai target kebutuhan adalah sebanyak 305 orang yang terdiri dari 218 orang jenjang kelulusan SMA, 64 orang jenjang D3 dan 23 orang jenjang S1. PTBA memiliki keunikan dalam memilih dan memilah pekerjaan berdasarkan kompetensi pegawai yang sebenarnya. Perseoran membuat sistem pengembangan pegawai melalui penerapan "*Talent Management*" untuk memperoleh gambaran rinci mengenai ketersediaan dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Sepanjang tahun 2013, ITM telah melaksanakan berbagai cara untuk mengembangkan kualitas SDM-nya, antara lain dengan seminar, lokakarya, pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan instruktif.

4.5 Penerapan CSR ITM

Kategori Ekonomi

Dari pendistribusian nilai ekonomi, terlihat bahwa kinerja ITM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham namun juga berpengaruh positif kepada pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi, ITM tidak mencantumkan aspek implikasi finansial dan risiko serta peluang jika terjadi perubahan iklim, cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti serta bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.

Kategori Lingkungan

Kebijakan 3R dibuat oleh ITM untuk mengelola dan mengolah limbah, 3R yang dimaksud antara lain :

1. *Reduce*: berupaya mengurangi jumlah limbah melalui penerapan efisiensi operasional.
2. *Reuse*: berupaya menggunakan kembali barang-barang bekas pakai.
3. *Recycle*: berupaya melakukan daur ulang, dilaksanakan sendiri maupun diserahkan kepada pihak yang berkompeten.

Kategori Sosial

Dari aspek Hak Asasi Manusia, tidak ada sedikitpun ITM membahas aspek ini. Di dalam operasional ITM, kegiatan pertambangan yang dilakukan selalu berlangsung pada lahan yang relatif luas. Hal ini tentu bersinggungan dengan masyarakat sekitar. ITM berusaha untuk menjalin hubungan dengan komunitas sekitar dengan turut menyumbangkan kesejahteraan bersama antara perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh ITM adalah proyek-proyek infrastruktur yang bersifat fisik demi kelancaran operasional perusahaan dan juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ITM juga turut membantu dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi dampak debu, sepanjang jalur transportasi dilakukan penyemprotan dengan air secara reguler. Untuk evaluasi penanganan batubara terhadap dampak kesehatan, dalam periode tertentu tidak dilakukan sesuai *life cycle product* melainkan sesuai dengan ketentuan standar ISO dan SMK3 yang dijadikan rujukan.

4.6 Penerapan CSR PTBA

Kategori Ekonomi

Pada 2013, PTBA adalah satu-satunya BUMN batubara yang terdaftar di bursa saham dan membayarkan Rp3,61 triliun untuk pendapatan negara dalam bentuk royalti dan pajak. PTBA juga merupakan pemasok batubara nomor satu bagi pembangkit-pembangkit listrik milik negara yang dikelola Perusahaan Listrik Negara. Dampak ekonomi tidak langsung yang diberikan oleh PTBA dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, tidak hanya oleh karyawan PTBA saja. Dampak tersebut tertuang melalui pembayaran royalti, pajak, pembayaran gaji, upah dan kesejahteraan karyawan serta reklamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Kategori Lingkungan

PTBA mampu melakukan penghematan BBM & Listrik. Sumber energi tersebut digunakan PTBA untuk peralatan pertambangan, sarana transportasi dan infrastruktur, termasuk kantor dan perumahan PTBA.

Dalam hal konservasi air, PTBA semakin mengurangi pengambilan air dari sungai. PTBA membuat Fasilitas Pengolah Air Bersih (WTP) UPTE Limoa untuk mengolah air tambang per hari yang kemudian diproses menjadi air minum. Selain membuat fasilitas pengolah air bersih, PTBA juga memanfaatkan air hujan dengan cara ditampung untuk aktivitas pencucian peralatan tambang.

Kategori Sosial

Dalam aspek pekerjaan, total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama tahun 2013 mencapai kurang lebih 64.000 orang dari tahapan proses seleksi. Pada akhirnya, total karyawan baru yang tersebar dari jenjang SLTA hingga Strata-2 berjumlah 305 orang. Sedangkan untuk tingkat pergantian (*turn-over*), tercatat hanya 141 pegawai PTBA yang berhenti atau mencapai 4,5% dari total pegawai PTBA akhir tahun yang mencapai 3.115 pegawai. 125 orang berhenti karena faktor alami (pensiun), 14 orang

karena meninggal dunia dan 2 orang karena permintaan sendiri. Aspek selanjutnya adalah aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki. PTBA menegaskan bahwa pemberlakuan standar upah atau gaji semata-mata terjadi atas dasar perubahan prestasi pegawai, jenjang jabatan, masa kerja serta kinerja individu. Tidak ada faktor gender dalam menentukan besarnya upah atau gaji seseorang.

Selama tahun 2013, tidak ada keluhan yang terbukti terkait dengan ketidakpatuhan PTBA akan peraturan dan juga keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan. Setiap permintaan konsumen selalu dispesifikasikan oleh PTBA demi kualitas terbaik yang dihasilkan untuk konsumen. PTBA pun melakukan rapat koordinasi setiap bulannya untuk membahas kinerja *supply chain*, kepuasan konsumen, target kualitas dan sebagainya. PTBA membuka saluran telepon, *email* maupun surat kepada pelanggan dalam rangka memprioritaskan prinsip transparansi dan responsibilitas dalam memberikan layanan kepada konsumen.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pada umumnya, tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Indo Tambangraya Megah (ITM) dan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) tahun 2013 dapat dinyatakan sudah berjalan dengan baik. Dari prinsip dasar pertama yakni transparansi, kedua perusahaan telah mengungkapkan kinerjanya baik itu kinerja manajemen maupun kinerja keuangan dalam bentuk laporan tahunan yang telah di audit.

Pengungkapan CSR diambil dari *sustainability report* ITM dan PTBA yang dipublikasikan melalui *website* masing-masing perusahaan. Pengungkapan CSR yang dibahas dalam penelitian ini adalah 3 kategori yang menjadi bagian dari aspek material perusahaan seperti kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial.

Kategori ekonomi terdiri dari 4 aspek dan 9 indikator kinerja. Dari ke 9 indikator kinerja dapat dilihat bahwa baik ITM dan PTBA memenuhi 50% dari keseluruhan indikator. Masih ada 50% indikator yang belum dipenuhi oleh perusahaan dikarenakan memang tidak diungkapkan, tidak dilaksanakan ataupun perusahaan tidak mengerjakan hal tersebut dalam operasionalnya.

Kategori lingkungan terdiri dari 12 aspek dan 34 indikator kinerja. ITM berhasil memenuhi 12 sedangkan PTBA mengungkapkan lebih banyak 1 indikator yakni 13 indikator. Kedua perusahaan ini tidak mengungkapkan keseluruhan indikator yang sebenarnya jika diungkapkan akan sangat memberi gambaran bagaimana kedua perusahaan tersebut beroperasi dan dampaknya pada lingkungan.

Kategori sosial terdiri dari 4 bagian yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja terdiri dari 8 aspek dan 16 indikator kinerja. ITM dan PTBA berhasil memenuhi 6 kategori yang beberapa diantaranya dalam pemenuhan indikator yang berbeda. Hak asasi manusia terdiri dari 10 aspek dengan 12 indikator kinerja di dalamnya. PTBA mengungkapkan 7 indikator kinerja sedangkan ITM sama sekali tidak mengungkapkan apapun dalam bagian Hak Asasi Manusia. Bagian masyarakat terdiri dari 7 aspek dan 11 indikator kinerja. ITM hanya mengungkapkan 1 indikator kinerja dan PTBA hanya 2 indikator kinerja. Sebenarnya terdapat beberapa indikator yang diungkapkan PTBA, hanya saja setelah ditelusuri di laporan, tidak terdapat pernyataan atas pengungkapan CSR di indikator tertentu. Bagian terakhir adalah tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk terdiri dari 5 aspek dan 9 indikator kinerja. ITM mengungkapkan 2 indikator sedangkan PTBA lebih banyak 4 indikator yakni 6 indikator.

Hal yang perlu ditingkatkan oleh ITM dan PTBA adalah penambahan indikator kinerja yang berhasil diungkapkan pada *sustainability report* di tahun mendatang. Masih banyak indikator yang memegang kunci informasi yang penting agar *stakeholders* mengetahui sejauh mana perusahaan berdampak baik itu dampak positif maupun tindakan perusahaan meminimalisasi dampak negatifnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, analisis atas sumber data yang didapat dilihat dari sudut pandang penulis dan teori yang mendukung.
2. Beberapa indikator kinerja yang perusahaan cantumkan dalam indeks GRI perusahaan tidak selalu ada dalam laporan *sustainability report*nya.

5.3 Saran

Melalui penelitian ini penulis yang bermaksud untuk meneruskan penelitian atau melakukan penelitian sejenis dapat memperbaiki keterbatasan masalah, sehingga hasil yang didapat lebih sempurna dan komprehensif. Penulis selanjutnya dapat menganalisis tidak hanya bersumber pada laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan saja melainkan wawancara, observasi atau sumber berita dan sebagainya. Sehingga dapat diperbandingkan antara pengungkapan melalui laporan dan penerapan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisiura, A. (2014). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Len Industri (PERSERO). *Skripsi*. Malang:Universitas Brawijaya.
- Ayuningtyas, D. (2010). Analisis Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* serta Pengungkapannya pada Perusahaan-perusahaan Pemenang Indonesia *Sustainability Reporting Awards* (ISRA) 2008. *Skripsi*. Malang:Universitas Brawijaya.
- Bimantara, D. (2013). Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui *Sustainability Report* berdasarkan *Global Reporting Initiative* (Studi Kasus pada VHA Inc.). *Skripsi*. Malang:Universitas Brawijaya.
- Chariri, A., & Ghazali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Darwin, A. (2007,November). Pentingnya Laporan Keberlanjutan Akuntan Indonesia. Edisi No.3. Halaman 12-14. Retrieved from www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_03.pdf
- Deegan, C. (2000). *Financial Accounting Theory*. Australia: McGraw-Hill Australia Pty Limited.
- Denzin, N.K and Lincoln, Y.S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). (2002). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Jakarta.
- Global Reporting Initiative. G4 Guidelines. (2003). Retrieved from www.globalreporting.org
- <http://regional.kompas.com/read/2015/01/14/03513881/Cagar.Alam.di.Kaltim.Terancam.Eksplorasi.Pertambangan.dan.Aktivitas.Perusahaan> .(2015. Januari).
- Indo Tambangraya Megah Tbk. (2013). Laporan Tahunan. Retrieved from www.itmg.co.id .
- Indo Tambangraya Megah Tbk. (2013). Sustainability Report. Retrieved from www.itmg.co.id .
- Jansen, M. C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Constand Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.Hal 305-360.

- Kementrian BUMN. 2011. Peraturan Menteri negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta: Kementrian BUMN
- Kementrian BUMN. 2012. Peraturan Menteri negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta: Kementrian BUMN
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta:KNKG.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bank Indonesia. (2006). *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Indonesia*. Nomor 8/4/PBI/2006.
- Pratama, A G. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Said, R. Y., Hj Zainuddin, & Haron H., (2009). *The Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies*. *Social Responsibility journal*. Vol.5, No.2, hal 212-226
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat
- Sembiring, E. R. (2005). *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*. Solo:SNA VIII.
- Suharto,E. (2008). *Menggagas Standart Audit Program CSR*.
- Sukoharsono, Eko Ganis. (2004a). *How Fast Tobacco Can Be: The Logistical Process At Rothmans Of Pall Mall Indonesia In The 1997 Indonesian Economic Crisis (Joint Research with R.J.E. van der Heijden and B.G. Wagner of the Fontys University)*, *International Journal of Accounting and Business Society*, Vol 12, No 1
- Sukoharsono, Eko Ganis. (2005). *Green Accounting in Indonesia: Accountability and Environmental Issues*. *The International Journal of Accounting and Business Society*, University of Brawijaya.
- Sukoharsono, Eko Ganis, (2006). *Alternatif Riset Kualitatif Sains AKuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi, dan Case Study*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.

- Sukoharsono, Eko Ganis. (2008). *Analysis of Sustainable Development 2009 Report of PT.HOLCIM Indonesia Tbk Based on Indicator Protocols of Global Reporting Initiative and key Performance Indicators of Cement Sustainability Initiative*. *International Journal of Accounting and Business Society*. Volume 17, No.1
- Sukoharsono, Eko Ganis, (2010). *Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan : Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Brawijaya. Malang.
- Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (2013). Laporan Tahunan. Retrieved from www.ptba.co.id
- Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 2013. *Sustainability Report*. Retrieved from www.ptba.co.id
- Utami, Indah P. (2013). *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Risiko Bisnis dan Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Petrokimia Gresik*. Tesis. Malang:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Waryanto, (2010). *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governace (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Skripsi. Semarang:Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publishing.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*. Bandung: Alfabeta.